

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-QURAN

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya.
Kementerian Agama RI, 2019.

B. Buku

Tutik, Titik Wulandari. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 3.
Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.

Asshiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 11. Depok:
Raja Grafindo Persada, 2019.

Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta:
Universitas Indonesia, 2019.

Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*. ed. Revisi, cet. 5,
Yogyakarta : Kanisus, 2006.

Muhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. ed. 1, cet. digital.
Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Fathammubina, Rohendra. *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. ed.
1, cet. digital. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2020.

Ichtijanto. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.

Al Munawwar, Said A. H. *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*.
Jakarta: Kaifa, 2004.

Masudi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif
Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan
Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*.
Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Redi, Ahmad. *Omnibus Law: Metode Sakti Mengatasi Kebuntuan Praktik
Berhukum. Omnibus Law Diskursus Pengapdopsiannya ke dalam
sistem Perundang-undangan Nasional*. Depok: Rajawali Press,
2020.

Telaumbanua, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. cet. 1. Yogyakarta:
Deepublish, 2019.

- Kartasapoetra, Gunawi. *Et.al. Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*. cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Budiono, Abdul Rachman. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. cet. 3. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1999.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagkerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Palguna, I. D. G. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara lain*. cet. 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr.Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Marzuki, Laica. *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Mustafa Fakhri. *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*. Jakarta: PSHTN FH VI dan MK, 2002.
- Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan, 1999. Hal. 74-76. Lihat juga; Ambary, Hassan Muarif. *Menemukan Jejak Arkeologis dan Historis Islam*. Jakarta: Logos, 1995. Hal. 56-58.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. ed. 1 cet. 1. Jakarta: Rajawali Perss, 2007. Hal. 35.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*, ed 1 cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012. Hal. 72.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. ed.1 cet. 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018. Hal. 40-41.

C. Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. LN Tahun 2020 Nomor 216, TLN Nomor 6554.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. LN Tahun 2022 Nomor 2022 Nomor 143.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 56.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 10.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 12.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang No. 14. LN No. 74 Tahun 1970, TLN NO. 2951, Penjelasan Pasal 1, sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (Indonesia (c), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 4, LN No.8 Tahun 2004, TLN No. 4358). UU No. 4 Tahun 2004 diganti dengan UU No.48 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. UU Nomor 11 Tahun 2020.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*. UU Nomor 13 Tahun 2003.

D. Jurnal

Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIX, No. 1, Juni 2019.

Rahendro Jati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif". *Rechtsvinding: Jurnal*. Vol. 1, No. 3, Desember 2012. Hal. 332.

Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020. Hal. 2.

- Basniwati, AD. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 2, No. 5. Agustus 2014. Hal. 256.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. “Hukum Responsif: Interelasi Hukum dan Dunia Sosial”, *Jurnal YUSTIKA: Media Hukum dan Keadilan*. Vol. 8, No. 7. Juli 2005. Hal. 39-40.
- Sulaiman. “Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 9, No. 2. 2014. Hal. 7-15.
- Arianto, Henry. “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”. *Lex Jurnalica*. Vol. 7, No. 2. April 2010. Hal. 119-122.
- Ahmadi. “Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif”. *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 9, No. 1. Januari 2016. Hal. 13-15.
- Busroh, Firman Freaddy. “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”. *ARENA HUKUM*. Vol. 10, No. 2. Agustus 2017. Hal. 142-241.
- Putra, Antoni. “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 17, No. 1. Maret 2020. Hal. 2.
- Matompo, Osgar Sahim. “Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”. *RECHTSTAAT NIEUW*. Vol. 5, No. 1. Oktober 2020. Hal. 24-28.
- Hermanto, Bagus. Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani. “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. Vol 17, No. 3. September 2020. Hal. 25.
- Rosika, Afione Ade. “Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 12, No. 1. Mei 2019. Hal. 28.
- Anggono, Bayu Dwi. “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47, No. 1. Januari 2018. Hal. 6.
- Asyari, Hasyim. “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan”. *Refleksi Hukum*. Vol. 2, No. 1. 2017. Hal. 84.

- Widyantoro, Widya Angga. *Et.al.* “Analisis Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No.113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah”. *Jurnal Abdikarya*. Vol. 5, No.1. 2022. Hal. 52.
- Irawan, Atang. “Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”. *Jurnal Litigasi*. Vol. 23, No. 1. April, 2022. Hal. 124-129.
- Wardi, Moch. Cholid. “LEGISLASI HUKUM ISLAM (Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik)”. *Jurnal Nuansa*. vol. 15, No.2. Juli – Januari 2018. Hal. 429.

E. Makalah

- Atmaja, Gede M. W. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1): Memahami Karakteristiknya”. Makalah disusun untuk keperluan belajar-mengajar dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018.

F. Internet

- Badan Pusat Statistik. “Data Penduduk Indonesia”. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.
- Situmorang, Basani. “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun Dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan”. 2010. <https://berandahukum.com/a/Asas-Asas-Hukum-Ketenagakerjaan>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
- Harris, Rahadyan Fajar. “Ragam Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI: Putusan Inkonstitusional Bersyarat dan Konstitusional Bersyarat”. 2021. <https://heylawedu.id/blog/putusan-inkonstitusional-bersyarat-dan-konstitusional-bersyarat>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
- Hukum Online. “Disetujui jadi UU, Ini 20 point perubahan UU pembentukan peraturan”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--ini-20->

poin-perubahan-uu-pembentukan-peraturan-lt628c9c89947e6/.
Diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. “Pemerintah terbitkan Perpu Cipta Kerja”. <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Peran dan Fungsi MK”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>.
Diakses pada tanggal 9 Januari 2023

Al-Baweany, Muhammad Syamsudin. “Kemaslahatan Rakyat Sebagai Acuan Utama Kebijakan Pemimpin”. Islami.co, <https://islami.co/kemaslahatan-rakyat-sebagai-acuan-utama-kebijakan-pemimpin/>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

Univesitas Islam An-Nur Lampung, “Pengertian Syarat dan Rukun”. <https://an-nur.ac.id/pengertian-syarat-dan-rukun/>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

Pengusaha Muslimah. “Kaidah Jual Beli dalam Fiqih”. <https://pengusahamuslim.com/4951-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-04.html>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

Yayasan Al-Masoem Bandung. ”Makna bathil dan contohnya”. almasoem.sch.id. Diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

UIN Surabaya. “Konsep jual beli dalam empat mazhab”. <https://digilib.uinsa.ac.id/10634/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2023.